

**IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
(RIPP) PROPINSI JAWA TENGAH**

DI DESTINASI WISATA SAM POO KONG KOTA SEMARANG

Oleh :

Arna A Manullang, Aloysius Rengga, M.Suryaningsih, Susi Sulandari

**Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata merupakan kegiatan multidimensional yang berkaitan erat dengan sosial, agama, kultur, seni, keindahan, budaya, lingkungan hidup dan teknologi. Dalam pengembangan pariwisata perlu diperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dilihat belum optimalnya kesiapan destinasi unggulan Kota Semarang yaitu Sam Poo Kong untuk bersaing karena lemahnya pengelolaan dan belum tersedianya dukungan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Disamping persaingan pariwisata yang semakin ketat, kompetensi SDM pariwisata yang dimiliki masih belum optimal.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata merupakan kebijakan yang mengatur tentang rencana pengembangan pariwisata di suatu daerah. Rencana Induk yang digunakan dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang merupakan RIPP Propinsi Jawa Tengah. Rencana Induk ini pula yang menjadi pedoman dalam pengembangan destinasi wisata Sam Poo Kong di Kota Semarang.

Pada penelitian ini digunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data angka, tulisan dan gambar. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, observasi dan studi dokumentasi. Melalui penelitian ini akan diperoleh data kemudian dianalisis melalui tahapan: Reduksi data – Pengujian data – Menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi RIPP Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan di destinasi wisata Sam Poo Kong Kota Semarang belum dapat mengatasi permasalahan pariwisata di Kota Semarang sehingga perlu dibuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Semarang. Untuk memperjelas pengembangan pariwisata Sam Poo Kong secara teknis maka diperlukan juga suatu SOP.

Kata kunci: Rencana Induk, Pariwisata, Kota Semarang, Sam Poo Kong

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komponen utama dalam aktifitas pariwisata adalah obyek dan daya tarik wisata. Obyek dan daya tarik wisata tersebut merupakan suatu modal utama untuk dijadikan kawasan yang dikelola menjadi suatu kegiatan wisata. seiring dengan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan tersebut Menteri Pariwisata menjelaskan hingga kini Indonesia masih berada pada peringkat 70 dunia dari 140 negara. Indonesia mempunyai target agar kepariwisataan Indonesia akan naik menjadi peringkat ke 30 di Tahun 2019.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang juga termasuk dalam daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kepariwisataannya. Kota Semarang secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan daerah lain. Secara geografis memiliki potensi alam daerah perbukitan dan daerah pantai yang memiliki nilai jual

pariwisata yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara sosiologis seni dan budaya masyarakat yang majemuk dan multi kultur memberikan kekhasan terhadap seni dan budaya masyarakat Kota Semarang yang harmonis.

Pembangunan pariwisata di Kota Semarang seharusnya dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan (RIP) Kepariwisata Daerah. Hal ini terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang kepariwisataan di Kota Semarang. Pada kenyataannya, Kota Semarang dalam pengembangan destinasi pariwisata masih mengacu pada RIPP Propinsi Jawa Tengah. RIPP Kota Semarang masih dibahas di Dewan Legislatif sampai akhir tahun 2015. Hal demikian tentu saja akan menyulitkan bagi implementor yaitu Dinas Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata Kota Semarang.

Isi kebijakan yang terdapat dalam RIPP Propinsi Jawa Tengah tidak terlalu sesuai dalam pengembangan potensi pariwisata Kota Semarang. Akhirnya menyebabkan tidak semua potensi Kota Semarang dapat diolah dan dikembangkan secara maksimal. Dari pengembangan pariwisata yang tidak maksimal tersebut berdampak pula pada pengembangan objek wisata religi di Kota Semarang yang menjadi salah satu ikon destinasi wisata di Jawa Tengah yaitu Klenteng Agung Sam Poo Kong atau yang dikenal juga dengan Gedong batu.

Sam Poo Kong merupakan peninggalan seni budaya yang dibangun dengan kekhasan arsitektur Cina yang indah dipadu dengan arsitektur Jawa. Percampuran dua budaya yang menyatu menjadi suatu daya tarik tersendiri di tengah kawasan permukiman dan industri yang ada di sekitarnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah di

destinasi pariwisata Sam Poo Kong Kota Semarang?

2. Apa faktor penghambat dan pendorong Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah di destinasi pariwisata Sam Poo Kong Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah di Destinasi Pariwisata Sam Poo Kong Kota Semarang
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintah dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah di Destinasi Pariwisata Sam Poo Kong Kota Semarang.

D. Kajian Teori

John M. Pfifner and Robert V. Prethuis menjelaskan pengertian administrasi negara dengan beberapa ungkapan sebagai berikut :

- a. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan

kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

- b. Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang.

Kebijakan Publik

James E. Anderson (*dalam Islamy, 2003 :17*) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Amara Raksasataya (*dalam Islamy, 2003 : 17*) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu kebijakan menyangkut tiga elemen, yaitu : (a) Identifikasi dari suatu tujuan yang ingin dicapai (b) Taktik atau strategi

dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan (c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang memiliki tujuan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan.

Dalam proses kebijakan maka tahapan yang paling kompleks dan kritis merupakan tahapan implementasi. Implementasi kebijakan memerlukan berbagai kegiatan operasional yang rinci (detail), melekat dan terintegrasikan dalam kehidupan administrasi sehari-hari. Setiap kebijakan harus diimplementasikan agar kebijakan tersebut memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan oleh aktor kebijakan baik pemerintah ataupun pihak yang ditentukan sebagai pelaksana kegiatan. Hal serupa juga dikemukakan

oleh Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan oleh badan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

Winarno (2008: 221) mengemukakan ada beberapa implementor atau pelaksana kebijakan publik yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) Birokrasi (2) Lembaga Legislatif (3) Lembaga Peradilan (4) Kelompok-kelompok Penekan (5) Organisasi Masyarakat

Menurut Riant Nugroho pada dasarnya implementasi kebijakan senantiasa dilakukan oleh dua aktor secara bersama-sama : *state and society*. Karena kebijakan publik adalah kepentingan dari aktor yang sama pula : *state and society*.

Pada dasarnya terdapat “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (Nugroho, 2014: 686)

Pertama, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketetapan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy*. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

“Tepat” yang kedua adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan,

sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bertujuan mengarah-kan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola atau di mana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri ber-skala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

“Tepat” ketiga adalah “tepat target”. Ketetapan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan yang lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang nampaknya

baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

“Tepat” keempat adalah “tepat lingkungan”, yaitu interaksi diantara lembaga-lembaga perumusan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J Caista (1994) menyebutkan sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista sebagai variabel eksogen yang terdiri dari *public opinion* yang persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan,

interpretative institution yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi dan saling berhubungan satu sama lain. Variabel tersebut yaitu :

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Sam Poo Kong Kota Semarang. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Propinsi Jawa tengah da Kota Semarang, pengelola Sam Poo Kong dan masyarakat wisata dan sekitar Sam Poo Kong yang dipilih dengan teknik snowball sampling. Sumber data yang digunakan adalah

data primer data yang diperoleh dari responden melalui hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder berupa dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, menguji kualitas data dengan teknik triangulasi data dengan wawancara mendalam dengan informan atau narasumber, uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan, konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Implementasi RIPP Propinsi Jawa Tengah di Detinasi Wisata Sam Poo Kong

Implementasi RIPP telah menyesuaikan regulasi yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan yang efektif dapat dilihat dari :

- a. Ketepatan Kebijakan

Dilihat dari perumusan RIPP Propinsi Jawa Tengah di Sam Poo Kong Kota Semarang melibatkan pemerintah, akademisi dan masyarakat/organisasi. Selain melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusannya, kebijakan juga seharusnya bermuatan hal-hal yang sesuai dengan kepentingan pengelola dan masyarakat. Namun RIPP Propinsi Jawa tengah ini, belum mengatur tentang kepentingan pengelola dan masyarakat. Pengelola dalam hal ini adalah Yayasan Sam Poo Kong. Masyarakat dalam hal ini terdiri dari masyarakat ekonomi sekitar Sam Poo Kong (pedagang, petugas parkir), pengunjung yang berwisata dan pengunjung yang ingin beribadah. Adanya batasan-batasan kegiatan wisata yang dilakukan di Sam Poo Kong diatur dengan kebijakan dari pengelola yaitu Yayasan Sam Poo Kong.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor RIPP Propinsi Jawa Tengah telah mengetahui secara jelas tupoksi yang diberikan dan memerankan peran sesuai dengan tingkat urgensi masing-

masing. Staff dinas pariwisata telah melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan isi kebijakan,. Namun pemangku kepentingan lainnya seperti pengelola dan masyarakat belum mengetahui secara pasti dan detail aturan apa yang seharusnya mereka patuhi. Hal ini dikarenakan tupoksi pengelola dan masyarakat tidak diatur secara jelas dan RIPP Propinsi Jawa Tengah tersebut.

c. Ketepatan target

Target yang ingin dicapai sesuai dengan isi RIPP Propinsi Jawa Tengah adalah tersusunnya pedoman dan arahan strategis dan implementasi bagi pengembangan pariwisata di daerah. Sasaran ini telah terlaksana dilakukan mengingat telah disusun dan disahkannya RIPP Kota Semarang sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang.

Sedangkan target yang ditentukan implementor dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Semarang adalah melalui hubungan kerjasama pariwisata dengan pelaku pariwisata seperti pelaksanaan atraksi atau promosi sehingga dapat meningkatkan

kunjungan wisatawan rata-rata 10% per tahun. Pembangunan kemitraan yang dibangun dalam pengembangan destinasi Sam Poo Kong adalah kemitraan dengan Yayasan Sam Poo Kong yaitu sewa menyewa lahan di sebelah utara Sam Poo Kong yang digunakan sebagai lahan parkir. Adanya penyewaan dan pengelolaan lahan tersebut akan menambah pemasukan PAD Kota Semarang. Selain itu, target lainnya adalah adanya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya 10%.

Pada kenyataannya peningkatan jumlah kunjungan di Sam Poo Kong tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pariwisata utamanya lahan parkir. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya lahan parkir yang tersedia sehingga pengunjung Sam Poo Kong menggunakan lahan milik warga setempat. Akibatnya, warga yang memiliki lahan tersebut menetapkan tarif parkir yang sangat tinggi kepada pengunjung karena memang tidak ada peraturan yang membatasi.

d. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan yang terdapat dalam perumusan RIPP terdiri dari lingkungan internal yaitu lembaga pemerintah yang diberikan tanggung jawab secara langsung mengenai pariwisata yaitu dinas pariwisata bersama dengan lembaga lainnya di lingkungan pemerintah seperti Bappeda, Disperindag, UMKM dan sebagainya. Sedangkan lingkungan eksternal dalam perumusan kebijakan ini adalah pengelola DTW beserta dengan asosiasi pariwisata dan masyarakat.

Sedangkan implementor kebijakan ini di Kota Semarang yaitu dinas pariwisata Kota Semarang yang berperan dalam pembangunan destinasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran serta pengorganisasian kepariwisataan. Yayasan Sam Poo Kong dalam hal ini berperan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Sam Poo Kong.

Persepsi publik akan pengembangan Sam Poo Kong dinilai kurang baik karena masih terdapat tanggapan/respon negative dari masyarakat mengenai kurangnya ketersediaan fasilitas di Sam Poo

Kong utamanya lahan parkir di Sam Poo Kong ketika jumlah pengunjung meningkat drastis.

2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi

a. Sumberdaya

Berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk menyelenggarakan kebijakan secara efektif. Selain sumberdaya manusia, diperlukan juga sumberdaya finansial untuk dapat menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut.

- Sumberdaya manusia (staff)

Lembaga dan instansi Kota Semarang terkait pengembangan pariwisata, Yayasan Sam poo Kong dan Organisasi Pariwisata di Kota Semarang tampaknya mendukung pelaksanaan RIPP. Para pelaksana bekerjasama dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang khususnya di Sam Poo Kong dengan menjalankan tugas masing-masing. Para pelaksana bekerjasama dalam pengembangan wisata di Sam Poo Kong Kota Semarang untuk

meningkatkan kunjungan dan kegiatan wisata di Semarang.

- Anggaran (*Budgetting*)

Ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengembangan pariwisata Sam Poo Kong yang bersumber dari APBD adalah dana yang disampaikan tidak dalam bentuk langsung, namun diberikan dalam bentuk pembangunan jalan dan transportasi menuju Sam Poo Kong serta pengadaan lahan parkir untuk pengunjung. Selain itu dari pihak pemerintah juga memfasilitasi pelatihan pemandu wisata yang dikoordinir dengan bantuan Himpunan Pariwisata Indonesia di Semarang. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas fisik di dalam Sam Poo Kong bersumber dari donatur yang dikelola oleh pihak yayasan Sam Poo Kong.

b. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, serta bagaimana struktur organisasi

pelaksana kebijakan. Efektivitas implementasi RIPP propinsi Jawa Tengah di Kota Semarang juga perlu didukung oleh komunikasi yang berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi yang ada dalam implementasi RIPP kurang jelas karena tidak membahas tentang pariwisata di Kota Semarang atau Sam Poo Kong secara rinci dan mendetail.

c. Disposisi

Efektivitas implementasi RIPP di Sam Poo Kong akan tercapai apabila perilaku pelaksana kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Termasuk pemahaman implementor juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi RIPP Propinsi Jawa Tengah di Sam Poo Kong kota Semarang. Implementor memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pengembangan pariwisata di Kota Semarang.

Implementor tidak hanya memahami tetapi juga turut mendukung kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi

penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dalam struktur birokrasi, yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi perpecahan birokrasi karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi efektif.

Struktur birokrasi memuat hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan SOP dalam pengembangan pariwisata Sam Poo Kong. Mengenai ketersediaan tersebut, sesuai dengan pemaparan hasil penelitian di bab sebelumnya disebutkan bahwa SOP yang selama ini dilihat untuk pengembangan pariwisata Sam Poo Kong adalah standar usaha kawasan pariwisata dan SOP pelayanan dan pengelolaan sarana pariwisata dinas pariwisata Jateng. Hal demikian menunjukkan bahwa SOP yang secara khusus yang bermuatan hal-hal terkait pengembangan wisata budaya seperti Sam Poo Kong ini belum ada.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Destinasi Sam Poo Kong merupakan destinasi wisata budaya unggulan sekaligus menjadi ikon

wisata Kota Semarang yang dikelola oleh pihak swasta yaitu Yayasan Sam Poo Kong. Pengembangan pariwisata di Kota Semarang membutuhkan sebuah pedoman regulasi di dalam pengembangannya agar pengembangan yang dilakukan sesuai dengan sasaran pembangunan yang dirumuskan dan telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pedoman regulasi yang digunakan adalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini masih berlaku dan digunakan sampai akhir 2015. Pada akhir tahun 2015 disahkan RIPP tingkat kota oleh DPRD Kota Semarang.

Timbulnya kendala atau permasalahan implementasi disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Adanya kesiapan dari para aktor ternyata tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dalam pengimplementasian RIPP Propinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

implementasi RIPP Propinsi Jawa Tengah di Sam Poo Kong Kota Semarang, diantaranya: Kuantitas dan kualitas pemandu wisata yang kurang baik, sikap pengelola Sam Poo Kong yang kurang terbuka menunjukkan bahwa belum adanya disposisi atau sikap yang baik serta belum adanya SOP yang mengatur secara jelas mengenai pengembangan destinasi Sam Poo Kong.

2. Saran

Berikut saran atas implementasi RIPP Propinsi Jawa Tengah di Sam Poo Kong Kota Semarang

- Perlu adanya penguatan sinergi dan strategi yang dapat dilakukan melalui keterbukaan komunikasi dan interaksi yang intensif mengenai perkembangan pariwisata di masing-masing destinasi. Komunikasi ini dapat dilakukan antar unsur pelaksana agar hasil yang diperoleh bisa mencapai target yang telah ditetapkan dan juga hasil kegiatan mampu mencapai tujuan.
- Adanya peningkatan wisatawan ke Sam Poo Kong sebaiknya

diimbangi dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pariwisata utamanya lahan parkir. Diperlukan sosialisasi dan koordinasi dengan warga setempat pemilik lahan parkir di sekitar Sam Poo Kong dalam hal ketentuan penggunaan lahan tersebut dan tarif parkir yang dikenakan agar tidak mengecewakan pengunjung.

- Perlu adanya penyusunan SOP yang mengatur tentang pengembangan pariwisata di Sam Poo Kong agar dapat memperhatikan akulturasi budaya dan agama di dalamnya serta mampu menjawab kebutuhan wisatawan dan pengunjung yang ingin beribadah di Sam Poo Kong. Hal ini mengingat Sam Poo Kong merupakan destinasi unggulan yang juga khas di Kota Semarang.
- Perlu adanya keterlibatan masyarakat melalui terbentuknya POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) seperti yang terdapat pada

destinasi lain di Kota Semarang serta melibatkan kelompok tersebut dalam perumusan kebijakan atau program terkait pengembangan Sam Poo Kong. Melalui terbentuknya kelompok tersebut maka pemerintah juga akan lebih mudah untuk mensosialisasikan program dan kebijakan pariwisata yang telah dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pariwisata. 2013.
Statistik Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2013. Semarang
- Dinas Pariwisata. 2014.
Statistik Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2014. Semarang
- Kusumanegara, Solahuddin. 2009.
Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: GAVA MEDIA.

- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik teori dan Proses, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Sumber Lain :
- Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata
- Perda Provinsi Jawa Tengah No. 14 Tahun 2004 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Rencana Strategis SKPD (RENSTRA) Tahun 2010-2015
www.Jowonews.com/Pemkot
- Butuh Perda Rencana Induk Pariwisata (Diunduh pada tanggal 16 Desember 2014)
- Wikipedia. 2016. Kota Semarang.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang (Diunduh pada tanggal 2 Desember 2015)